DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Ribuan Tenaga Non-ASN Nasibnya Terancam

WATES (KR) - Ribuan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo terancam nasibnya akibat adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penghapusan pegawai non-ASN pada 2023 mendatang.

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo sedang menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh.

"Kami akan petakan pegawai non-ASN dan diusulkan sesuai formasi yang dibutuhkan. Sembari mengusulkan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah," kata Kepala BKPP setempat Sudarmanto SIP, Kamis (9/6).

Diungkapkan, ada 3.000 lebih tenaga non-ASN sebagai tenaga teknis dan administrasi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kependidikan di sekolah serta tenaga honorer di Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit dan puskesmas. Tenaga teknis maupun administrasi sangat dibutuhkan, ironisnya beberapa tahun terakhir formasi tersebut jarang dibuka. Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana menuturkan, pemkab akan mengatur lagi kebutuhan formasi di kabupaten ini.

"Kami cermati lagi kekurangannya berapa sekitar 2.000-an itu data kasarnya, tapi jumlah spesifiknya belum dicermati. Penghapusan tenaga honorer akan patuh terhadap pemerintah pusat. Kalau tidak begitu risikonya akan ditanggung sendiri." ucapnya. **(Rul)**

Pemkab Usulkan 13 Perda Dicabut

PENGASIH (KR)-Tiga belas Peraturan Daerah diusulkan Pemkab Kulonprogo untuk dicabut kepada DPRD setempat, sebab tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Pemkab berharap setelah diusulkan untuk dicabut, maka Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah bisa segera diadakan pembahasan untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Drs Tri Saktiyana MSi pada rapat paripurna di Ruang Kresna DPRD setempat, Kamis siang (9/6). Ke-13 perda yang diusulkan dihapus, meliputi Perda tentang Badan Usaha Milik Desa, Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perda tentang Kerja Sama Desa, Perda tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Wates. Perda tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, Perda tentang Retribusi Izin Gangguan.

Selanjutnya, Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Perda tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi, Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD NYI Ageng Serang, Perda tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan, Perda tentang Izin Usaha Industri, dan Perda tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pencabutan perda, dikatakan Tri Saktiyana, untuk menjamin kepastian hukum di daerah serta menjaga keserasian dan keselarasan antara perundangan-undangan di daerah dan peraturan perundang-undangan nasional. "Adanya kepastian hukum, diharapkan kegiatan pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dikatakan Drs HM Maryono, Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang Pencabutan Beberapa Perda, mempertanyakan berapa perda pengganti yang akan diterbitkan setelah pencabutan 13 perda. "Kami memperta-nyakan perda yang tidak mendukung Pendapat Asli Daerah (PAD), seperti Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok kenapa tidak dicabut," ujar Maryono. **(Wid)**

KR-Widiastuti

Rapur Penyampaian Raperda tentang Pencabutan beberapa Perda.

MEMASUKI PERTENGAH TAHUN

Obwis Dikunjungi 1,4 Juta Wisatawan

WONOSARI (KR) ñTingkat kunjungan wisata ke Kabupaten Gunungkidul mulai terasa ditengah membaiknya perkembangan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Memasuki pertengahan tahun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah masuk 37 persen atau Rp 10 miliar dari target yang ditetapkan ditetapkan sebesar Rp. 27 Miliar. "Dari catatan kami sudah ada 1,4 juta wisatawan berkunjung ke Gunungkidul," kata Kadinpar Mohammad Arif Aldian, Jumat (10/6).

Dengan perkembangan sektor pariwisata saat ini, pihaknya optimis target PAD sektor pariwisata pada tahun ini akan tercapai. Namun tentunya, hal ini juga akan bergantung dengan kondisi pandemi yang tengah berlangsung dan dengan catatan jangan sampai ada kejadian yang menyebabkan obyek wisata ditutup seperti saat pande.i Covid-19 lalu. Dari seluruh obwis yang dikunjungi wisatawan kawasan wisata pantai masih dominan sebagai daerah kunjungan wisatawan memcapai 90 persen. Sedangkan sekitar 10 persen mereka mengunjungi tempat lain. "Termasuk obwis mibat khusus," ujarnya,

Saat ini pihaknya berupaya keras agar target pendapatan pada tahun ini dapat tercapai mengingat hari libur nasional di luar akhir pekan hingga akhir tahun ini sudah tidak ada lagi. Pihaknya juga tetap melakukan promosi wisata melalui berbagai event. Seperti Weekend Fest di desa wisata Nglanggeran beberapa waktu lalu.

"Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku wisata juga penting untuk dilakukan agar pelayanannya maksimal," ucapnya. Terkait kemungkinan akan adanya perubahan target pendapatan seperti tahun lalu, dia mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

Untuk pembahasan terkait perubahan target pendapatan belum ada pembahasan karena itu dia berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target yang ditentukan. " Kami optimit target PAD pariwisata tahun ini mencapai target," tutupnya. **(Bmp)**

Tanpa SKKH Hewan, Ditolak Masuk Gunungkidul

WONOSARI (KR) - Setelah dua pekan di tutup Pasar Hewan Siyonoharjo, Kapanewon Playen, besok Minggu (12/6) dibuka.

Untuk mengantisipasi penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dipeterkeswan) Gunungkidul akan melakukan pemeriksaan secara ketat setiap hewan yang masuk di pasar hewan.

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas, melakukan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan (PKH) UGM, Komando Distrik Militer (Kodim) 0730, Polres, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan (Diperdag).

KR-Endar Widodo

Wibawanti Wulandari SP

Dinas juga akan menempatkan laboratorium di pasar untuk pemeriksaan. Untuk hewan yang datang dari luar kabupaten wajib menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

"Jika tidak menyertakan SKKH hewan tersebut tidak boleh masuk pasar," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Diperterkeswan) Gunungkidul, Wibawanti Wulandari SP dari SP, Jumat (10/6).

Petugas Dinas, FKH UGM ,Polres dan Kodim melakukan pemeriksaan hewan yang akan masuk pasar.

Untuk memudahkan pemeriksaan dibuat pintu masuk terbatas. Artinya, semua kendaraan dan hewan hanya boleh masuk pada pintu yang sudah ditentukan petugas.

Setelah lolos dari pemeriksaan mobil dan hewan yang masuk akan disemprot dengan disinfekten oleh petugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul. **(Ewi)**

Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Kulonprogo 2022

WATES (KR) - Hasil pemantauan Tim Penanganan Stunting Kabupaten Kulonprogo, angka stunting pada tahun 2021 ada 10,35 persen atau 2.119 balita. Adapun upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

"Rembug Stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/ lembaga non-pemerintah dan masyarakat," kata

Ketua Tim Penanganan Stunting Kabupaten Kulonprogo, Drs Jazil Ambar Was'an dalam *Workshop* Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Kulonprogo 2022 di Aula Adhikarta, Kompleks pemkab setempat, Kamis (9/6).

KR-Asrul Sani

Pj Bupati Tri Saktiyana dan Anggota DPRD Suharto menunjukkan komitmen bersama percepatan penurunan stunting di Kulonprogo.

Dijelaskan, percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang dilaksanakan secara multi sektor baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif.

Termasuk Pemkab Kulonprogo terus berupaya melakukan percepatan, pencegahan dan penanggulangan stunting.

Sementara itu Pj Bupati Drs Tri Saktiyana mengatakan Kulonrogo masih menghadapi berbagai masalah yang mendesak salah satunya stunting, sehingga bisa segera diselesaikan. Stunting memang menjadi masalah gizi yang dampaknya sangat besar dan intervensinya memerlukan peran semua pihak serta dukungan seluruh OPD. **(Rul)**

HARI JADI KALURAHAN BEJIHARJO

Ziarah Mantan Lurah Hingga Tirakatan

WONOSARI (KR) - Memperingati Hari Jadi ke76, Pemerintah Kalurahan Bejiharjo menggelar serangkaian kegiatan. Mulai dari pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, kebersihan lingkungan, pemukulan kentongan hingga sirine. Peringatan dilakukan sejak, Minggu (5/6) hingga Sabtu (11/6). Kalurahan Bejiharjo genap berusia 76 tahun pada, Sabtu (11/6).

"Selain itu juga dilaksanakan anjangsana ke mantan atau keluarga mantan lurah. Serta ziarajh ke makam mantan luran, upacara dan tirakatan," kata Lurah Bejiharjo Sigit Wibowo Nugroho di dampingi panitia penyelenggara Hari Jadi Bejiharjo Jumari SPd, Jumat (10/6).

Rombongan kalurahan silaturahmi keluarga almarhum Harjosutaso dan diterima anaknya KRT H Sunarto Probohadinegoro SH MM.

Dalam kesempatan tersebut H Sunarto menyampaikan terimakasih kepada kalurahan karena 'ngaruhke' dan mendoakan almarhum Harjosutaso. Dahulu merupakan lurah sebelum dan sesudah Kemerdekaan RI. "Harapannya lurah bisa membawa Bejiharjo semakin maju," ujarnya.

Sementara itu kegiatan anjangsana atau silaturahmi dan ziarah dibagi menjadi dua kelompok. Rombongan pertama dipimpin lurah Bejiharjo Sigit Wibowo Nugroho dan rombongan kedua dipimpin H Bahron Rasyid MM Bamuskal Bejiharjo. Kelompok dua silaturahmi kepada Tukarjo dan keluarga almarhum Supriyo dan keluarga almarhum Yanto. **(Ded)**

KR-Dedy EW

Anjangsana ke tempat mantan lurah Bejiharjo.

LOMBA DESAIN LOGO 77 TAHUN Kedaulatan Rakyat

Berhadiah !!
7,7 juta

Peserta
1. Lomba terbuka untuk Umum
2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.
3. Peserta melampirkan scan foto kopi identitas diri/ Ketua jika peserta grup (kelompok).

Kriteria Logo
1. Logo adalah karya asli peserta.
2. Logo harus dapat diterapkan pada berbagai media.
3. Logo belum pernah dipublikasikan.
4. Desain harus menggambarkan
   a. Semangat SKH Kedaulatan Rakyat sebagai media massa tertua di Indonesia lahir dari kancah perjuangan.
   b. SKH Kedaulatan Rakyat penuh semangat mengabdi masyarakat dengan informasi akurat.
   c. SKH Kedaulatan Rakyat menjadi media yang 'migunani tumraping liyan'.
5. Dewan Juri berhak melakukan perubahan desain pemenang bila diperlukan dan pemenang wajib melakukan revisi.

Jadwal Penerimaan dan Penjurian
1. Batas akhir penerimaan desain adalah tanggal **18 Juni 2022.**
2. Penjurian dilakukan tanggal **23 Juni 2022**
3. Pemenang diumumkan tanggal **27 Juni 2022** Melalui SKH Kedaulatan Rakyat dan KRJogja.com
4. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
5. Desain juara 1 menjadi hak milik SKH Kedaulatan Rakyat

Kriteria Penilaian
1. Keaslian karya
2. Kesesuaian dengan tema Usia ke 77 SKH Kedaulatan Rakyat Migunani Tumraping Liyan.
3. Estetika
4. Pengaplikasian logo pada berbagai media.

Ketentuan Teknis
1. Peserta wajib mengirim desainnya melalui email: **logokr77@gmail.com** dengan **kerapatan pixel 300 dpi.**
2. File dalam bentuk jpg dan file aslinya (corel, adobe atau format lainnya).
3. **Ukuran logo : 1024 X 1024 pixel.**
4. Peserta dapat mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) desain logo.
5. Lengkapi dengan Identitas peserta (Nama, Alamat, Pekerjaan, No telpon/hp) .
7. Melampirkan pernyataan keaslian desain yang ditandatangani.

INFORMASI LEBIH LANJUT
kedaulatanrakyatnewspaper
@krjogjadotcom
Kedaulatanrakyat.
KRjogja.com
Kedaulatan Rakyat TV.